

BAB III

**IMPELEMENTASI PROGRAM KELOMPOK ASUH
KELUARGA BINANGUN (KAKB) OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 - 2016**

A. Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 - 2016

Kelompok Asuh Keluarga Binangun yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dari Kabupaten Kulon Progo. Kelompok Asuh Keluarga Binangun merupakan kelompok pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat ditingkat pedukuhan yang keanggotaannya mencakup Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Miskin Absolut. Keikut sertaan Keluarga Sejahtera dalam program ini dimaksudkan sebagai motivator sekaligus inovator kegiatan dalam kelompok sehingga dapat memacu keluarga pra sejahtera dan keluarga miskin absolut untuk bangkit dan memberdayakan diri. Kegiatan dari Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) berupa kegiatan kewirausahaan secara berkelompok melalui warung - warung Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) atau kegiatan ekonomi produktif lainnya sehingga keluarga pra sejahtera dan miskin absolut memperoleh peningkatan penghasilan dalam bimbingan keluarga sejahtera didalam kelompoknya. Kelompok Asuh Keluarga Binangun dapat memiliki orang tua asuh dari

perusahaan - perusahaan milik pemerintah maupun swasta guna memperoleh perkembangan kemajuan kelompok.

Tujuan dari adanya program Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini untuk memberdayakan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Miskin Absolut dari sisi ekonomi serta menumbuhkan semangat wirausaha melalui fasilitas dan pendampingan oleh Keluarga Sejahtera agar lebih berdaya dari sisi ekonomi dan juga adanya upaya mengangkat keluarga miskin absolut yang secara fisik sudah tidak mungkin di berdayakan.

Manfaat dari adanya upaya Pemberdayaan ekonomi keluarga ini berbeda dengan model - model pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan pada umumnya. Pada umumnya upaya pengentasan kemiskinan ini dilakukan dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan dengan pendirian perusahaan atau industri. Dengan demikian model - model pengentasan kemiskinan ini menjadi kurang optimal karena keluarga pra sejahtera dan keluarga miskin absolut tetap rentan berada taraf semula manakala perusahaan yang dibangun mengalami kebangkrutan dan terjadi PHK.

Sementara pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Program Keluarga Asuh Keluarga Binangun ini lebih mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan baru secara mandiri., pengelolaan usaha juga secara mandiri dan yang melaksanakan pembimbingan adalah keluarga dengan taraf sejahtera yang tergabung dalam Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) itu sendiri.

Dalam cara pandang ini, keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam bermasyarakat dan memiliki pengaruh sangat besar terhadap lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga dianggap sebagai tiang negara karena didalam keluarga - keluarga inilah sebuah negara terbangun. Digambarkan bahwa apabila keluarga sebagai penyangga negara rapuh karena lemah secara ekonomi, maka negarapun akan rapuh pula karena keluarga yang lemah secara ekonomi mau tidak mau dianggap akan membebani negara dan negara pun tidak mengharap dukungan keluarga secara optimal untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dasar hukum program Keluarga Asuh Keluarga Binangun ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Diambil dari Media Center Kabupaten Kulon Progo data pada tahun 2014, dijelaskan bahwa Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) memiliki konsep pemberdayaan dengan prinsip keluarga sejahtera mengasuh keluarga pra sejahtera.

1. Perumusan Program Kegiatan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Perincian program kegiatan adalah perumusan kegiatan - kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) Kabupaten Kulon Progo. Program ini adalah program usulan dari Bupati Kabupaten Kulon Progo yaitu dr. Hasto Wardoyo, S.P.(OG). hal ini dikemukakan oleh ibu Rr. Ratih

Indriyani, SE selaku penanggung jawab program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dari seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013. Berikut merupakan penjelasan ibu Rr. Rarih Indriyani, SE,

“kita memang ada program KAKB, dulunya program ini adalah program yang diusulkan oleh pak bupati untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo,kegiatannya dengan nanti berdagang atau industri kreatif, nha program ini kami nanti yang kasih modal ”

Hal sebut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintahan Pusat dapat menyerahkan urusan kepada Pemerintah Daerah dan menjadi urusan rumah tangganya dengan ketentuan tidak melanggar urusan - urusan yang memang tidak di serahkan kepada daerah meliputi:

- a. Urusan Pertahanan
- b. Urusan Monoter
- c. Urusan Peradilan
- d. Urusan Luar Negeri

Kegiatan ini melibatkan keluarga sejahtera dan keluarga miskin absolut dalam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang. Dengan adanya keselarasan antara semua pihak berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dirasa merupakan pekerjaan rumah pertama dari masa kepemimpinan dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG) setelah menjabat bupati pada tahun 2012. hingga sekarang persoalan kemiskinan menjadi hal yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan apalagi menyangkut dengan kesuksesan kepemimpinan. Kemiskinan sendiri dirasa memberikan dampak negatif ke semua sektor yaitu dapat meningkatkan pengangguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana sosial dan akan menghambat kemajuan dari suatu daerah.

Kabupaten Kulon Progo ini sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dihadapkan dengan persoalan kemiskinan. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pada tahun 2011 angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo masih mencapai 24,64% dan menduduki peringkat ke-empat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan suatu yang serius untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo

menargetkan pembangunan besar - besaran di kawasan Kabupaten Kulon Progo yang tentunya dibutuhkan kesiapan dari masyarakat daerah untuk mampu menerima pembangunan - pembangunan tersebut, sehingga masyarakat lokal secara langsung maupun tidak langsung dapat diuntungkan dengan pembangunan yang ada di daerahnya.

Sebelumnya, Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si dan Agus Tri Basuki, SE.,M.Si (2013; 31) dalam penelitian berjudul Penyusunan Indikator dan Pemetaan Kantong Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo ini terjadi terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sehingga masyarakat tidak dapat berproduksi dengan optimal. Pada kondisi ini unit - unit produksi tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek sosial ekonomi maupun lingkungan. Kata kunci untuk pola kemiskinan ini adalah ketidakberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan beberapa terobosan - terobosan pengentasan kemiskinan yaitu Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Program ini dirintis tahun 2012 dan dimulai tahun 2013. namun pada saat itu belum ada peraturan yang mengikat. Peraturan tentang program ini baru dikeluarkan tahun 2015 setelah ada teguran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kulon Progo. Pihak yang menegur adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“awal dari program ini itu 2013 tapi kemarin ada beberapa permasalahan diantaranya adalah itu pengurus di KAKB tidak jelas, serta itu tidak ada peraturan yang mengikat. Jadi waktu itu kami minta untuk dilampirkan pengurus kelompok yang jelas dan juga kami minta itu peraturannya. Nha itu langung dibuatkan dan 2015 baru diterbitkan.”

Peraturan Daerah yang terbentuk adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Ruang lingkup dari penanggulangan kemiskinan ini meliputi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak dasar keluarga miskin, penyelerasan untuk mewujudkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pola kemitraan. Terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

- 1) Melindungi hak dasar
- 2) Memberikan pelayanan dasar
- 3) Melaksanakan secara konsisten, menyelaraskan dan memadukan program penanggulangan kemiskinan
- 4) Membangun kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

Perlu untuk diketahui bahwa dalam perumusan program ini diperlukannya beberapa indikator - indikator penyusun sebagai berikut:

a. Perincian Tugas

Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan melindungi masyarakat miskin agar tidak jatuh miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan terbagi dalam kegiatan - kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan perlindungan terhadap keterlantaran.
- 2) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- 3) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil
- 4) Peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Pada setiap desa diangkat Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertugas melaksanakan pendampingan terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan. Tugas pendampingan yang dimaksud adalah:

- 1) Menginformasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah
- 2) Melaksanakan penilaian dan membantu akses kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan

- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan secara luas terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- 4) Melaksanakan tugas dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Jumlah kader pada setiap desa proporsional dengan memperlihatkan jumlah penduduk dan luas desa yang bersangkutan. Pengangkatan Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan oleh aparatur Pemerintah Daerah.

Masyarakat diberikan kesempatan seluas - luasnya untuk berperan aktif dalam program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh:

- 1) Pemerintah
- 2) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Pemerintah Daerah
- 4) Dunia Usaha

Keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dimaksud adalah berupa perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, akademisi, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi atau lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dapat dibentuk atas inisiatif masyarakat atau prakarsa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Daerah dalam hal ini memberikan dorongan dan pembinaan atas peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan dorongan dan pembinaan peran serta masyarakat dapat dibentuk wadah atau forum potensi sumber kesejahteraan sosial.

Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) sesuai dengan apa yang tertuang dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang ada di daerah telah menciptakan program pengentasan kemiskinan dengan salah satu strategi menggunakan bantuan modal kepada masyarakat miskin yang ada di Kulon Progo. Hal ini dikemukakan oleh ibu Rr. Ratih Indriyani, SE selaku penanggung jawab program kegiatan

Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) pada saat itu sebagai berikut:

“sistem yang kami gunakan dalam program KAKB ini setiap kelompok kami kasih kan dana Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kami titipkan di BPD Bank Pasar. Itu uang tidak dikembalikan, bentuknya semacam hibah untuk permodalan kelompok itu.”

Pelaksana utama program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Selain itu untuk membantu program ini diperlukan peran serta ke aktifan masyarakat baik masyarakat secara lebih luas atau dalam artian masyarakat sejahtera yang berperan sebagai motivator dan pembimbing jalannya kegiatan dilapangan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Priyo Santoso ketika wawancara di Gedung DPRD Kulon Progo sebagai berikut:

“visi daripada program itu bagus. Jadi kalau warga miskin langsung diberikan dana tidak akan berjalan karena pengembangan dana juga butuh SDM. Jadi sekali lagi ini adalah program kombinasi adanya fungsi dari masyarakat yang kaya atau cukup untuk mendampingi”

Selain itu, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ibu Rr. Ratih Indiyanti, SE ketika wawancara di Gedung Badan Keluarga Berencana sebagai berikut:

“Program KAKB ini perpaduan antara si kaya dan si miskin Jadi nanti dalam perjalanan supaya tidak mandek harus adanya peran dari si kaya untuk mendampingi si miskin, nah si miskin ini fungsinya yang akan di berdayakan oleh di kaya itu.”

Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) disosialisasikan kepada masyarakat melalui Kecamatan kepada beberapa desa dan dusun yang termasuk dalam wilayah administrasinya. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tahun 2012. Untuk mempermudah program ini, Kecamatan bekerjasama dengan Kelurahan untuk membimbing dusun - dusun yang ada di dalamnya untuk mensosialisasikan program dan selanjutnya membuat proposal usaha untuk diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Setelah proposal masuk ke dinas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyeleksi proposal - proposal yang telah masuk untuk selanjutnya di tentukan kelompok - kelompok yang dikira cukup layak untuk diberikan dana hibah. Pemberian dana Hibah melalui Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau BPD Kulon Progo.

Dituturkan oleh Ibu Rr. Ratih Indriyani, SE Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana proposal yang masuk lebih dari 200 proposal.

“kami menyeleksi semua proposal yang masuk ke kami. Hampir semua dusun di Kulon Progo mengirimkan proposal ke dinas proposal yang masuk ke kami lebih dari 200 proposal. Terus seleksi diambil 100 kelompok..”

Selain itu, dalam program Kelompok Asuh Keluarga Binangun(KAKB) ini terdapat kelompok target yaitu kelompok - kelompok KAKB yang tergabung dalam POSDAYA (Pos Pemberdayaan) yang ada di pedukuhan. Kelompok Asuh Keluarga Binangun terdiri dari dua macam yaitu Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) Warung dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) Ekonomi Produktif.

Telah dijelaskan dinas bahwa Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini terdiri dari dua unsur yaitu keluarga sejahtera dan keluarga miskin absolut. Perencanaan awal diharapkan keluarga sejahtera dapat membimbing keluarga miskin absolut sehingga dapat berkembang dan keluar dari kemiskinannya. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Fraksi PAN Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo bapak Priyo Santoso sebagai berikut:

“kelompok itu diberikan dana oleh Kabupaten untuk bisa di kembangkan. Hasil dari pengembangan itu untuk kesejahteraan anggota miskin dikelompok itu, fungsinya yang kaya itu adalah untuk mendampingi secara pemikiran, kemampuan dan yang lain - lain. Manfaat hasil untuk yang miskin. KAKB didalamnya ada dua unsur yang saling menjalankan usahanya. Jadi kalau warga miskin langsung diberikan dana tidak akan berjalan karena pengenmangan dana juga butuh SDM. Jadi sekali lagi ini adalah program kombinasi adanya fungsi dari masyarakat yang kaya atau cukup untuk dapat mendampingi. Pendampingan itu tidak serta merta memberikan barang atau harta katakanlah tetapi juga diharapkan mampu mendeteksi apa penyebab faktor kemiskinan dan mengakomodasi faktor - faktor yang menjadikan kemiskinan.”

Terdapat kesesuaian antara apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 serta fakta di lapangan dan apa yang telah diimplemtasikan bahwa terdapat semua pihak yang tergabung di dalam implementasi program KAKB. Adanya peran masyarakat didalamnya diharapkan mampu untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin absolut.

b. Perumusan Tujuan yang Jelas

Pengentasan kemiskinan melalui KAKB yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 bertujuan untuk:

- 1) Terwujudnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak - hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat
- 2) Tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah
- 3) tercapainya penurunan jumlah pengangguran

- 4) Terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- 5) Terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas - luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Sasaran dari penanggulangan kemiskinan model ini adalah penurunan angka kemiskinan pada keluarga miskin secara bertahap, terarah dan terukur. Uraian tersebut sesuai dengan tujuan dari program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini. Program yang dirintis tahun 2012 awal ini menargetkan terwujudnya 100 kelompok KAKB dengan basis ekonomi mandiri. Hal ini pernah di kemukakan oleh staf Bupati Kulon Progo Bidang Pemerintahan saat itu yaitu Herminantarti sebagai berikut:

“Program ini merupakan program pemikiran Bupati Kulon Progo, Bapak Hasto Wardoyo. Bahwa POSDAYA dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun untuk mensukseskan program ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Dana Sejahtera Mansiri tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) melalui pemberdayaan masyarakat”

Tujuan dari program Kelompok Keluarga Asuh Keluarga Binangun ini jelas yaitu program ini difungsikan sebagai alat untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan potensi - potensi lokal yang ada di daerah sehingga dapat mendukung program pengentasan kemiskinan lain yang di gagas oleh Bapak dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG) yaitu Bela Beli Kulon Progo.

Bela Beli Kulon Progo sendiri adalah gerakan masyarakat untuk membeli produk - produk daerah asli Kabupaten Kulon Progo guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dimana kelompok berperan sebagai produsen dan masyarakat Kulon Progo atau khususnya masyarakat sekitar kelompok menjadi konsumen dari produk yang KAKB jual. Hal ini disampaikan oleh ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“ya Kelompok KAKB ini tujuannya ya memberdayakan masyarakat - masyarakat desa secara ekonomi produktif. Untuk menekan angka kemiskinan di Kulon Progo dan secara tidak langsung menyerap angka pengangguran”

Program yang merupakan pemikiran dari Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bapak dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG) ini bertujuan mengantarkan masyarakat miskin absolut mampu untuk masuk ke kelompok pemberdayaan dan dapat menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah daerah. Selain itu menurut Herminingtarti selaku Staf Bupati Kabupaten Kulon Progo Bidang Pemerintahan, program Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini digiatkan dalam rangka mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) melalui pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pencapaian MDG's yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil, memastikan kelestarian lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dari penjabaran yang dituturkan oleh pengelola program Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini terdapat kesamaan tujuan antara pemerintah daerah dengan program yang dilaksanakan oleh instansi - instansi Pemerintahan. Program Kelompok Asuh Keluarga

Binangun (KAKB) merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

c. Penentuan Biaya dan Waktu

Pembiayaan program Kelompok Asuh Keluarga Binangun disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Besarnya dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini diintegrasikan kedalam anggaran penyusunan program atau kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Berjalan atau tidaknya suatu program kegiatan tidak dapat terlepas dari adanya biaya atau tidak. Program biasanya akan terhenti apabila dana atau biaya tidak ada. Dalam program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini setidaknya membutuhkan dana Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah).

“total dana yang dibutuhkan untuk terselenggaranya program ini adalah senilai Rp. 1.000.000.000,-, itu diambilkan juga dari APBD 2013 dan langsung dikirimkan ke kelompok - kelompok yang sudah menang dalam proses seleksi”

Untuk pengalokasian dana Rp. 1.000.000.000,- tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo memberikan masing - masing kelompok yang lolos dalam program ini senilai

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). hal tersebut juga di sampaikan oleh Ketua Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Priyo Santoso.

“Pemerintah itu memberikan Rp. 10.000.000,- juta untuk masing - masing kelompok penerima Hibah KAKB. Dan itu kelompoknya ada 100 jadi kalau 10 dikalikan Rp. 10.000.000,- itu sekitar 1 milyar itu kami alokasikan”

Berikut adalah rincian dana untuk Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 3.1

Rincian Anggaran dan Sumber Pembiayaan Program KAKB

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah
1	CSR Pabrik Quick Salamrejo	Rp. 100.000.000,-
2	APBD Kab. Kulon Progo th. 2013	Rp. 900.000.000,-
Total		Rp. 1.000.000.000,-

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Pengalokasian dana tersebut adalah tahun 2014, hal ini disampaikan oleh kelompok - kelompok KAKB yang telah lolos. Tahun penganggaran untuk program ini adalah tahun 2013. Selain itu,

untuk menunjang program ini pemerintah daerah berhasil menarik dana CSR dari pabrik traktor yang berada di kelurahan Salamrejo, Sentolo senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). dana ini diberikan kepada kelompok melalui Bank Pasar Daerah Kabupaten Kulon Progo (BPD). hal ini di sampaikan oleh ketua fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Muhyadi.

“pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencairkan anggaran 10 miliar kemudian dititipkan ke BPD Bank Pasar Kulon Progo untuk kemudian disalurkan ke kelompok - kelompok KAKB yang lolos untuk di danai”

Namun, saat dana tersebut masuk terdapat beberapa permasalahan dan kesalah pahaman antara instansi yang satu dengan yang lain. Hal tersebut di jelaskan oleh ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE selaku penanggung jawab program ini.

“Nha saat dana segitu banyaknya turun, BPK langsung turun untuk mengawasi dana tersebut langsung disidak oleh BPK. Lha orang dana 10 milyar itu bukan dana yang sedikit juga untuk pelaksanaan program dan kami ada temuan - temuan dari BPK saat itu. ”

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kulon Progo yang menyebutkan bahwa berdasarkan resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, BPK memerintahkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menegur secara tertulis kepada

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang dinilai lemah dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan hibah KAKB.

Selain itu, BPK pada tahun 2014 memerintahkan kepada kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana menegur penanggungjawab dari program KAKB yang belum melakukan identifikasi resiko penyalur dana hibah ini.

Hal ini sangat disayangkan oleh Muhyadi sebagai ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kulon Progo

“ini perlu dicermati, anggaran tersebut disimpan di BPD Bank Pasar. Jangan sampai bermasalah seperti pemberian bantuan modal lembaga keuangan mikro (LKM) disetiap desa yang memakan korban hingga masuk penjara karena korupsi”

Total biaya yang digunakan dalam program ini mencapai Rp. 1.000.000.000,- (1 Miliar Rupiah). Modal tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus juta Rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari CSR Pabrik Quick yang berada di Salamrejo, Kecamatan Sentolo. Dana tersebut di titipkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Bank Pembangunan Daerah Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo untuk disalurkan kepada masing - masing kelompok yang telah lolos.

dana yang di gunakan dalam pembiayaan program ini mencakup dana dari APBD yang dianggarkan tahun 2012 dan 2013. selain itu sebagian anggaran yang digunakan untuk pembiayaan kelompok diterima dari CSR Pabrik Traktor yang berada di Kecamatan Sentolo.

d. Perumusan Kegiatan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, KAKB dalam penanggulangan kemiskinan berasaskan pada:

- 1) Kemanusiaan
- 2) Keadilan Sosial
- 3) Gotong Royong
- 4) Kesejahteraan
- 5) Kesetiakawanan
- 6) Keberlanjutan
- 7) Keterpaduan
- 8) Pemberdayaan

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berhak untuk memiliki hak dan melaksanakan tanggung jawabnya. Penduduk dan Keluarga dengan kategori kemiskinan berhak sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan
- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan

- 3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- 4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- 5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- 6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- 7) Memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman
- 8) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan
- 9) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Sedangkan daripada itu, penduduk dan keluarga dengan kategori miskin, bertanggung jawab untuk:

- 1) Menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi.
- 2) Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
- 3) Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- 4) Berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan
- 5) Meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

- 6) Memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan memperoleh perlindungan sosial meliputi rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asisten sosial, asuransi kesejahteraan sosial, jaminan sosial sesuai jenis dan kriteria sasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat diatas dilakukan dengan kegiatan meliputi:

- 1) Pelatihan keterampilan diberikan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan
- 2) Bimbingan, pengelolaan atau manajemen kewirausahaan
- 3) Fasilitas peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
- 4) Fasilitas pengorganisasian relawan atau pemerhati penanggulangan kemiskinan
- 5) Fasilitas usaha kelompok
- 6) Fasilitas kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta

Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri. Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan diberikan modal usaha. Selain itu, pendampingan dilakukan dalam rangka penguatan dan keberlanjutan usaha penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan. Program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha

mikro dan kecil dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha meliputi:

- 1) Peningkatan permodalan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin
- 2) Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin
- 3) Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir
- 4) Peningkatan saran dan prasarana usaha.

Setelah dana turun kepada kelompok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat memberikan pelatihan kepada kelompok - kelompok yang tergabung dalam KAKB di tingkat Kabupaten. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan administrasi dan pelatihan penjualan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kelompok Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) yang berada di Kecamatan Temon, Maju Mulia yaitu ibu Rantiyah yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dana itu turun ke kita tahun 2014 akhir mbak. Nha setelah itu dari Dinas ada semacam penyuluhan gitu. Kita semua digabungin di gedung kaca. disana kita dikasih semacam penyuluhan pelatihan pembukuan”

Dalam program Kelompok Asuh Keluarga Binangun, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. Namun juga dapat melalui

pemberian modal usaha yang dapat berguna untuk menciptakan peluang usaha di sekitarnya. Salah satu kelompok KAKB yang cukup berhasil adalah Kelompok KAKB Teratai II yang berada di Bantar Wetan, Banguncipto, Kecamatan Sentolo.

Kelompok KAKB Teratai II ini bergerak di bidang ekonomi produktif yaitu kerajinan rajut. Dalam kelompok KAKB ini pengurus mampu menyerap tenaga - tenaga kerja warga sekitar untuk ikut membantu dalam pembuatan rajutan. Pemasaran kelompok ini di bantu oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Dari data yang ada kelompok KAKB Teratai II sudah memiliki hampir 20 pegawai belum termasuk kelompok KAKB. Ketua kelompok KAKB Teratai II, Ibu Sumartini menuturkan sebagai berikut:

“kelompok kami sudah berjalan dulu mbak. Baru diajukan ke dinas waktu ada pembukaan itung - itung buat tambah modal usaha to. Kegiatan kami selalu rutin arisan kumpul - kumpul tiap bulan mbak setiap tanggal 14 jadi antara anggota satu dan lain juga dekat. Sistem di kelompok kami, semua ikut kerja kalau ngak kerja ya tidak di bayar, tapi nanti pas lebaran ya kami kasih - kasih bingkisan itu keluarga yang kurang mampu.”

Sistem KAKB dimana didalamnya terdapat perpaduan antara keluarga sejahtera dengan keluarga miskin absolut menunjukkan asas - asas yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 terwujud dengan baik di beberapa kelompok.

2. Penentuan Kelompok Sasaran Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Dalam proses implementasi program seperti yang di kemukakan oleh Suranto (2014: 23) diperlukan sekurang - kurangnya ada tiga unsur yang berperan yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, adanya kelompok target dan adanya pelaksanaan (implementor). Dalam program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dan diambil dari rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo didapat bahwa KAKB merupakan turunan dari kegiatan Pos Pemberdayaan, sasaran program ini adalah pedukuhan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

a. Sosialisasi kelompok - kelompok sasaran

Tidak jauh berbeda dengan implementasi program lainnya. Dalam pengimplementasian program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dimulai dengan proses sosialisasi program. Rr. Ratih Indriyanti SE menuturkan:

“Proses pertama kami ya melakukan sosialisasi karena kalau tidak di sosialisasikan banyak masyarakat yang tidak tahu program ini. Oleh karena itu kami mengundang pihak kecamatan dulu untuk kemudian kecamatan mensosialisasikan program yang dari kita. ”

Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo kepada pihak kecamatan untuk kemudian diturunkan ke pihak desa. Isi dari sosialisasi meliputi:

- 1) Struktur penulisan proposal kewirausahaan
- 2) Alur dalam pengumpulan proposal
- 3) Ketentuan perlombaan

Program KAKB ini mendapat respon yang baik dari pemerintah yang berada di tingkat Kecamatan.

b. Penyaringan kelompok - kelompok sasaran

Tahap kedua adalah penyaringan kelompok - kelompok yang telah mengumpulkan proposal kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Proposal yang masuk berjumlah lebih dari 200 proposal untuk kemudian hanya menjadi 100 kelompok.. hal tersebut disampaikan oleh Ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE, sebagai berikut:

“saat proposal masuk ke kami, itu ada banyak sekitar 200 proposal masuk. Tapi kami hanya memilih menjadi 100. proposalnya ya di kirim ke dinas ke kantor nanti kami ada tim sendiri untuk pendaftaran ”

Penyaringan proposal dilaksanakan oleh seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Penentuan kelompok - kelompok sasaran

Penentuan kelompok - kelompok yang lolos dalam tahap seleksi proposal dilaksanakan 3 bulan setelah batas akhir proposal masuk ke dinas. Dari proposal yang masuk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Daftar kelompok - kelompok yang lolos tahap seleksi dapat dilihat di Lampiran 1.

Kelompok - kelompok yang telah lolos terdiri dari 12 Kecamatan yang masing - masing memiliki jumlah yang berbeda - beda. Jumlah terbanyak kelompok yang lolos ditempati oleh Kecamatan Waates.

d. Pemberian hibah

Pemberian hibah program Kelompok Asuh Keluarga Binangun Kabupaten Kulon Progo di laksanakan setelah proses penentuan kelompok - kelompok sasaran. Dana hibah kelompok di titipkan di BPD Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah penuturan dari ibu Rr. Ratih Indriyanti, SE terkait pemberian hibah:

“dana sepuluh juta masing - masing kelompok kami berikan melalui BPD Bank Pasar mbak, jadi itu tidak disalah gunakan oleh oknum - oknum tertentu karena sudah pasti masuk tabungan. Selain itu juga hemat waktu kalau kita transfer.”

Hal yang sama pun di tuturkan oleh ketua fraksi PAN, Priyo Santoso Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kulon Progo:

“jadi itu dulu kalau tidak salah danannya dititipin ke BPD Bank Pasar tidak langsung tunai dikasihkan karena untuk menghindari penyelewengan. Kelompok - kelompoknya di suruh buat tabungan dulu di bank itu.”

Pemberian dana di lakukan melalui tabungan BPD Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo agar terhindar dari penyelewengan dana hibah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

3. Monitoring dan Evaluasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan berkewajiban memberikan data dan informasi program melalui Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan. Monitoring dan evaluasi sangat di perlukan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini di gunakan untuk mengontrol apakah program yang sedang berjalan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan ataukah jauh dari pada harapan. Monitoring dilaksanakan sebagai antisipasi untuk pengambilan jalan tengah apabila program yang sedang berjalan nantinya tidak akan mencapai target yang di inginkan.

a. Pengawasan Implementasi Program KAKB

Monitoring kelompok - kelompok sasaran pada program Kelompok Asuh Keluarga Binangun dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Namun, dalam kinerjanya terhadap program ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo ini diawasi oleh Pemerintahan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Seperti beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh anggota dewan Ketua Fraksi PAN bapak Priyo Santoso.

“monitoring apa ini? Kalo monitoring program tetap itu tanggung jawab dari dinas yang melakukan yaitu Pemberdayaan. Tapi ngak tau itu sekarang masih dilaksanakan monitoring apa tidak karena sudah lama tidak dengar kabarnya.”

Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dalam program ini bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan yang langsung dapat berinteraksi dengan kelompok - kelompok sasaran.

b. Evaluasi Implementasi Program KAKB

Evaluasi kelompok - kelompok sasaran diperlukan untuk mengetahui apakah program kegiatan berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan serta sesuai dengan tujuan awal pembentukan program. Evaluasi program kegiatan di lakukan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Diturunkan oleh Ibu Ratih selaku penanggungjawab program bahwa;

“evaluasi program kami lakukan tiga bulan sekali untuk evaluasi triwulan. Nha biasanya kami lakukannya di Kecamatan masing - masing jadi agar mereka tidak terlalu jauh juga tetapi juga efektif nanti evaluasinya kita kasih blangko untuk mengisi perkembangannya .”

Setiap 3 bulan sekali Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsinya untuk mengawasi dan mengevaluasi program kegiatan mereka.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memang dilaksanakan selama 3 bulan sekali. Hal tersebut sesuai pernyataan dari salah satu kelompok KAKB yang menyebutkan mereka diberikan blangko isian kemudian setiap tiga

bulan sekali dikumpulkan di Kecamatan. Namun, evaluasi seperti ini hanya dilaksanakan satu tahun setelah dana di turunkan.

B. Faktor - Faktor Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Dalam proses implementasi kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya, banyak faktor - faktor yang dapat mempengaruhi didalamnya baik itu faktor dari luar maupun dari dalam. Secara umum faktor - faktor tersebut adalah berupa sumber daya, struktur organisasi, hubungan antara organisasi, persoalan komitmen pelaksana, sistem pelaporan, sikap politisi dan faktor - faktor lain. Faktor - faktor tersebut telah banyak mempengaruhi pelaksanaan dari penerapan kebijakan dengan program - program tertentu terutama pembangunan.

1. Faktor Komunikasi dalam Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Dalam melaksanakan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kepada personal yang tepat dan mampu, selain itu perintah yang disampaikan haruslah jelas akurat dan konsisten. Demikian pula dibutuhkan komunikasi yang baik untuk memenuhi berjalannya program kebijakan. Dalam komunikasi ini terdapat tiga aspek pokok yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten.

Transmisi dalam komunikasi adalah perpindahan suatu informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk melaksanakan program ini diperlukan adanya transmisi komunikasi yang baik. Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini merupakan program perpaduan yang melibatkan banyak pihak, pasalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tidak dapat berjalan sendiri.

Rincian awal program ini adalah memaksimalkan potensi - potensi yang ada di daerah supaya dapat lebih berdaya guna. Contoh dari yang sudah ada adalah salah satu kelompok KAKB (Kelompok Asuh Keluarga Binangun) yang berada di Kecamatan Panjatan yaitu Laris yang berada di Pedukuhan II, Cerme, Panjatan. Kelompok ini bergerak dibidang ekonomi produktif pengolahan bawang merah. Kelompok ini saat ini masih berjalan meskipun tidak seperti dahulu, karena terdapat beberapa kendala diantaranya adalah pemasaran yang tidak terjangkau dan kurangnya informasi - informasi dari daerah yang berkaitan untuk mempromosikan produknya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menuturkan melalui penanggung jawab kegiatan Rr. Ratih Indriyanti, SE di Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

“kami dulu awal pembentukan berkoordinasi dengan berbagai instansi - instansi seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan masih banyak lagi. Nha kami buat forum diskusi agar KAKB ini berjalan dengan baik”

Namun, sekali lagi faktor komunikasi ini tidak berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan timbul di lapangan saat pelaksanaan program. Kejelasan dari program ini masih dipertanyakan oleh sebagian pihak yang ada di instansi - instansi pemerintahan. Media Center Kulon Progo data tahun 2014 menyebutkan bahwa Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini memiliki konsep pemberdayaan dengan prinsip keluarga sejahtera mengasuh keluarga pra sejahtera. Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun inipun sudah berjalan tetapi masih dalam sebatas inisiatif untuk menjalankan program kegiatan, belum ada perencanaan yang jelas dan belum dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Hal tersebut yang membuat komunikasi yang berjalan antara instansi Pemerintah Daerah yang satu dan yang lainnya tidak sesuai, sehingga mempengaruhi berjalannya kelompok - kelompok KAKB yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Dari 100 kelompok KAKB yang berdiri dan diberikan dana Hibah sejumlah Rp. 10.000.000,- per kelompok, dan menelan anggaran daerah sebesar Rp. 900.000.000,- ini hanya beberapa saja yang masih berdiri. Beberapa banyak yang sudah mati dan anggota tidak lagi aktif, sekali lagi kurangnya kontrol dari berbagai pihak serta pendampingan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kurang.

Namun, terdapat beberapa kecamatan diantaranya adalah kecamatan Wates yang masih memantau anggota - anggota KAKB walaupun hanya sekedar datang saja.

Kurangnya kejelasan program dari bagaimana menentukan kelompok - kelompok sasaran, apa saja program kegiatan, serta bagaimana peran serta dari masing - masing dinas untuk menyukseskan program ini juga tidak jelas.

Komunikasi yang dibangun untuk mensukseskan program ini sehingga dapat berjalan dengan baik adalah terutama dengan instansi - instansi lain yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu yang paling utama adalah komunikasi yang dibangun dengan kelompok - kelompok yang telah lolos sehingga dapat terpantau dengan baik dan komunikasi antara anggota didalam kelompok.

Dilapangan penulis menemukan terjadinya ketidaksesuaian komunikasi yang terjalin antara pihak Pemerintahan Daerah atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan kelompok - kelompok KAKB. Hampir 50% kelompok KAKB sudah tidak aktif lagi karena lemahnya pengawasan dari Pemerintah dan terdapat diantaranya yang tidak berjalan dari awal pembentukan.

Ambil contoh unttuk kondisi komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan kelompok KAKB Mekar I, yang berada di Pedukuhan Kwarakan, Sidorejo, Lendah. Kelompok KAKB Mekar I

Pedukuhan Kwarakan Kecamatan Lendah ini bergerak dalam bidang ekonomi produktif berbentuk usaha konveksi saat inipun sudah melayani beberapa sekolah yang ada di sekitar pedukuhan tersebut, namun memang kelompok ini memiliki tempat yang tidak strategis yaitu berada di daerah pegunungan yang berbatasan langsung dengan daerah Srikayangan Kecamatan Sentolo dengan kondisi wilayah susah untuk dijangkau. Bapak Suratijan selaku ketua dalam kelompok menuturkan bahwa dari awal mereka pembentukan kelompok hingga saat ini pihak terkait dari pemerintah baik itu pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten sama sekali belum berkunjung dan mengkonfirmasi apakah kelompok tersebut masih berjalan ataukah tidak.

“dari awal kami berdiri belum ada kunjungan dari dinas. Dari tahun turunnya dana tahun 2013 sampai sekarang yang namanya dinas apa orang kecamatan yang katanya ada itu kami tidak pernah dikunjungi. Mungkin karena tempat kita yang jauh dari pemerintahan apa gimana aku juga nggak reti. Tapi yang jelas kami butuh pembinaan, tapi kami belum pernah juga dapat pembinaan”

Kelompok Mekar I merupakan salah satu kelompok yang saat ini masih aktif dan dapat mengangkat anggota miskin absolut yang ada di dalamnya dengan usaha konveksinya. Namun kelompok ini pun terkendala dengan pemasaran karena selama ini mereka hanya melayani jahitan dari warga sekitar dan sekolah - sekolah yang ada di pedukuhan itu. Tidak hanya itu saja kelompok KAKB yang sudah berdiri yaitu Gurami yang berada di Pedukuhan Gletak, Kedungsari, Kecamatan

Pengasah dengan ekonomi produktif ternak ikan gurameh pun merasakan hal yang sama. Kelompok ini merasa pemerintah tidak serius dengan mengadakan program ini dah hanya sebatas mengadakan saja. Berikut adalah penuturan dari Bapak Sukardi selaku ketua dari tim Gurami.

“dulu ada waktu awal - awal kami berdiri tu, 3 bulan 6 bulan pemerintah ya kesini. Itu sama bu ratih kesini juga nenggok dan kasih blangko laporan kegiatan dan perkembangan. Tapi sekarang akhir - akhir ini udah hampir 2 atau 3 tahun ini pemerintah ngak ada ngaruhke kegiatan kami, padahal kelompok kami baru maju - majunya dulu. Kendala kami kan cuma di pemasaran tapi kan kami ngak tau cenel mana yang harus kami masuki, selain itu anggota juga ngeyel kalau disuruh buat kelompok. Sudah sibuk dengan dunianya.”

Komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang kurang kepada para kelompok KAKB mengakibatkan tidak berjalannya proses implementasi kebijakan seperti sebagaimana seharusnya program berjalan. Salain itu komunikasi yang dibangun antar dinas pun seperti dinas perdagangan yang seharusnya menjadi wadah para kelompok yang sekiranya mempunyai potensi untuk masuk dan dikembangkan di Dinas tersebutpun tidak berjalan dengan mulus.

Dari 100 kelompok, 80 kelompok menurutkan bahwa tidak ada komunikasi lebih lanjut yang dijalin antara dinas dengan kelompok - kelompok KAKB, forum komunikasi hanya 1 tahun waktu awal mereka berdiri selebihnya tidak ada. Untuk tahun setelah terbitnya Oeraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015, dari pihak Instansi Daerah baik

Kecamatan maupun Dinas tidak ada yang datang untuk melaksanakan evaluasi dan pemantauan.

2. Faktor Sumber Daya dalam Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) ini bertujuan untuk mengurangi jumlah warga masyarakat miskin di Kabupaten Kulon Progo karena pada tahun tersebut pada tahun 2012 Kulon Progo mempunyai pemimpin baru Bapak dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG) yang menciptakan terobosan dalam pengentasan kemiskinan berupa pemberian dana hibah kepada kelompok - kelompok dimana sistem yang ada dalam kelompok itu adalah anggota miskin di berdayakan lebih lanjut oleh keluarga - keluarga yang dianggap mampu secara finansial.

Tabel 3.2.

Garis Kemiskinan dan Penduduk di Kabupaten Kulon Progo

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Persentase
2010	225.059	90,06	23,15
2011	240.301	92,76	23,62
2012	250.945	93,21	23,31

Sumber: Survey Ekonomi Nasional

Berikut adalah gambaran besar dari jumlah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, jumlah total penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo naik pada tahun 2011 dan 2012 dengan perolehan angka 92,76 menjadi 93,21.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo terjadi terutama karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sehingga masyarakat tidak dapat berproduksi dengan optimal. Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin mempunyai 4,9 anggota rumah tangga. Jumlah rata - rata anggota rumah tangga ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata - rata anggota rumah tangga yang tidak miskin. Ciri -ciri lain yang melekat pada rumah tangga miskin adalah tingkat pendidikan kepala Rumah Tangga yang rendah, Data yang disajikan BPS memperlihatkan bahwa 72,01% dari rumah tangga miskin di pedesaan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga yang tidak tamat SD, 24,32% dipimpin oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SD.

Selain itu, letak geografis suatu daerah dan kondisi sumber daya alam yang ada di daerah penerima program juga sangat mempengaruhi apakah program kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kondisi kelompok sasaranpun seharusnya dipertimbangkan.

Di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, menurut tahapan keluarga sebanyak 123.105 keluarga yaitu keluarga Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 44.711 keluarga atau sejumlah 36,32%, Keluarga Sejahtera I sebanyak 25.972 keluarga atau sejumlah 21,10%, keluarga Sejahtera II sebanyak 13.512 keluarga atau sebanyak 27,97%, Keluarga Sejahtera III sebanyak 34.434 keluarga dan Keluarga Sejahtera III+ sebanyak 4.476 keluarga atau 3,64%. berikut adalah rincian dari tahapan keluarga dari setiap Kecamatan.

Berhasil atau tidaknya suatu program kegiatan tergantung kemampuan dari para aktor - aktor pelaksananya. Sangat disayangkan memang ketika wilayah tersebut mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar, namun aktor - aktor dalam kelompok KAKB tidak dapat menyalurkan dan mengembangkan itu. Seperti contoh di Kecamatan Samigaluh.

Kecamatan Samigaluh memiliki potensi alam yang baik. Wilayah Kecamatan Samigaluh yang terletak di Perbukitan Menoreh dan memiliki ketinggian untuk menghasilkan berbagai macam hasil perkebunan. Di Kecamatan Samigaluh sendiri merupakan penghasil kopi terbesar di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, di Perbukitan Menoreh hanya Kecamatan Samigaluh yang mempunyai perkebunan teh. Selain itu, di Kabupaten Kulon Progo, kecamatan Samigaluh juga merupakan penghasil cengkeh yang melimpah. Namun kelompok - kelompok yang lolos untuk tahap ini hanya bergerak di bidang warung. 3 kelompok yang

saat ini terdapat di Samigaluh sudah tidak lagi aktif dan beroperasi sejak tahun 2016.

selain itu, tidak hanya di Kecamatan Samigaluh saja namun masih banyak di kecamatan lain. Kelompok KAKB warung banyak yang sudah tidak aktif lagi seperti di Kecamatan Panjatan tepatnya di Pedukuhan VII, Bojong, Panjatan dengan kelompok KAKB bernama Flamboyan. Sugiyarto menuturkan bahwa kegiatan di kelompoknya sudah tidak aktif lagi selama November 2016, namun bentuk warung masih ada. Berikut penjelasan secara jelas.

“warung KAKB nya ya ini mbak. Tapi kami sudah tidak aktif , sudah tidak ada arisan apa pertemuan sejak tahun kemarin tahun 2016. lha wong diajak kumpul aja susah e mbak. Sibuk dengan urusan sendiri - sendiri. Lama - lama juga mreteli ini anggota kelompoknya. Jadi warung juga masih saya yang ngelola. Dulu hasil dari warung juga tak bagi - bagi ke yg miskin tapi sekarang udah ngak ada lagi.”

Permasalahan tentang anggota tidak hanya terjadi di panjatan saja. Kelompok KAKB yang bermasalah dengan anggotanya pun terjadi di kecamatan lain. Kelompok KAKB Sindutan B yang beralamat di Sindutan B, Sindutan, Temon, Kelompok KAKB ini bergerak di bidang ekonomi produktif pengolahan susu kedelai. Dalam kelompok ini permasalahan adalah kepada anggota kelompok. Berikut adalah penuturan Nur Khasanah sebagai ketua kelompok.

“kalau dikami itu pengolahan susu kedelai mbak. Jadi nanti kita buat untuk di jual di pasar - pasar kalau enggak disekolah - sekolah tk. Nha sejak 2015 kami sudah tidak aktif. Udah lama emang. Lha gimana lagi, kalau susu kedelai kan buatnya harus pagi, ngak boleh malem terus paginya di jual nanti bisa basi itu ngak enak. Nha tempat pembuatan kan disini ya, lha seharusnya kan semua ikut andil, dulu seih tahun 2015 awal kita ada bagi tugas, jadi aku yang buat nanti ada yang memasarkan tapi juga jenuh e orang yang nandangi juga cuma orang - orang ini aja yang lainnya ngak ada kesadaran sama sekali.”

Selain itu permasalahan yang sama terjadi di Kelompok KAKB Ngudi Lestari di pedukuhan Tegalrejo, Janten, Temon. Kelompok KAKB ini berbentuk warung. Berikut adalah penuturan R. Tri Novianto selaku ketua kelompok KAKB Ngudi Lestari:

“kalau kelompok, jujur ya ini sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2016 akhir kemarin. Ya bulan - bulan agustusan kemarin. Kalau dulu tu sistem yang kami lakukan tu ya ganti - ganti yang jaga. Nanti perjaga kita kasih Rp. 10.000,- per hari. Tapi malah ngak ada untung e. hehe untungnya cuma buat bayar itu. Tapi itu yang jaga juga yg miskin itu sih. Kalau sekarang warung itu masih ada. Tapi kami udah lama ngak kumpul. Jadi warung langsung dikelola yg miskin absolut sekarang, kami udah ngak ada waktu buat ngurus.”

Tidak hanya itu saja, di kelompok KAKB Setapan Berdaya, pedukuhan IX, Pleret, Kecamatan Panjatan yang bergerak dibidang ekonomi produktif dengan usaha budidaya jamur juga mengalami masalah dikarenakan para anggota yang tidak mau ikut andil. Berikut adalah penuturan dari Sudjiyo selaku ketua dalam kelompok Setapan Berdaya:

“kami dulu usaha jamur mbak, tapi yang ngurusin cuma saya dan mbak Sumartini aja. Yang lainnya diajak juga gak mau e mbak. Banyak alasan padahal untungnya juga lumayan to mbak. Sekali panen aja itu kemarin dapat banyak lho. E ya sudah, cuma berjalan 3 bulan terus berhenti. Padahal udah tak carikan cicit yang bagus.”

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PAN Priyo Santoso pun menanggapi hal tersebut sebagai berikut:

“iya itu tadi lho mbak. Mereka itu kebanyakan warung, jadinya kan aneh ya. Orang warung aja gak gabung ke KAKB aja banyak Mereka buatnya warung, ya gak bakal maju. Warung yang dibuatpun juga cuma warung yang gitu - gitu aja, gak ada inovasi, makanya kemarin aku bilang dari awal kok cuma warung terus apa manfaatnya. Kayak gini gak bisa jadi program yang gunanya itu untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Orang yang miskin aja malah gak sadar kalau mereka diberdayakan, gak mau tau nya itu gede kalau di desa, apalagi pola pikir mereka juga berbeda. Makanya ini dulu kan saya ngomong ini perlu dikaji ulang. Ini udah menghabiskan dana yang lumayan gede lho.”

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo salah satunya melalui Kelompok Asuh Keluarga Binangun ini haruslah ada keberlanjutan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila tidak ada keberlanjutan dimungkinkan program pengentasan kemiskinan menjadi sia - sia. Faktor sumber daya manusia inipun merupakan faktor yang penting dalam keberlanjutan program. Kelemahan dalam program KAKB ini adalah lemahnya sumber daya manusia internal yang ada.

Selain itu, juga kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini bagi mereka juga masih sangat lemah. Dapat diambil perbandingan kelompok yang mampu untuk mengembangkan kelompoknya dan memiliki kesadaran yang baik seperti kelompok Teratai II dan Maju Mulia. Kelompok tersebut dapat memberdayakan baik itu anggota kelompoknya dan warga sekitar.

Usaha dari kelompok Maju Mulia yang diketuai oleh Rantiyah merupakan jualan keliling. Usaha ini mampu meraup untung untuk anggota sebesar Rp. 400.000,- /hari untuk kelompok. Sistem yang dikembangkan oleh Rantiyah adalah anggota kelompok membuat makanan dan kemudian dijual oleh rantiyah. Perolehan keuntungan per hari dari kelompok yang menitipkan makanannya yaitu sebesar Rp. 20.000,- hingga Rp. 30.000,- per hari. Untuk menambah erat hubungan antar anggota, setiap tanggal 14 setiap bulan kelompok ini melakukan pertemuan untuk sekedar makan dan arisan.

Sedangkan kelompok Teratai II berhasil dengan usaha rajutan. Kelompok ini mampu menyerap tenaga - tenaga kerja yang ada di sekitar Pedukuhan Bantar Wetan.

3. Faktor Anggaran dalam Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Faktor anggaran merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Karena berjalan baik atau tidaknya suatu kegiatan bergantung kepada adanya dana penunjang yang digunakan. Dalam implementasi program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) diakui sangat minim anggaran.

“Anggaran yang dikeluarkan untuk pendanaan kelompok saja sudah sedemikian banyak mbak. Jadi cuma habis untuk pendanaan di kelompok aja. Kita terkendala untuk dana monioriting dan evaluasi. Jadi sering terbengkalai.”

Dalam implementasi program KAKB dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan kelompok mencapai Rp. 1.000.000.000,- (1 Miliar Rupiah) dana tersebut diambil dari APBD senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selebihnya adalah dana CRS yang dikeluarkan oleh PT Quick. Diakui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Kabupaten Kulon Progo tidak ada dana khusus yang digunakan untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kelompok - kelompok KAKB. Berikut yang disampaikan oleh penanggungjawab program KAKB tahun 2013 ibu Ratih.

“untuk kami tidak ada anggaran khusus untuk monitoring atau evaluasi seperti program - program lain. Hawong keterbatasan anggaran. Jadi monitoringpun cuma manual - manual aja. Kalo pagi tak sempatkan ke kelompok - kelompok yang terdekat kayak di kelompok Sadewa”

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo merasa pihaknya pun merasa tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dikarenakan tidak adanya anggaran yang digunakan untuk mengawasi.

Selain itu, terdapat beberapa lima kelompok yang dana tidak langsung turun ke kelompok namun hanya jatuh pada ketua saja. Kedua permasalahan dalam anggaran inilah yang kemudian menghambat berjalannya program KAKB. Selain Dinas terkait tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kelompok - kelompok KAKB yang seharusnya mendapat pendampingan dan bimbingan seakan dilepaskan begitu saja dan kebanyakan dari mereka bubar.

Dengan tidak adanya anggaran yang memadai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai dinas yang menangani langsung dan bertanggung jawab atas program ini.

4. Faktor Pembagian Potensi dalam Implementasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Telah dijelaskan dalam sub bab Sosialisasi Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mensosialisasikan program ini dnegan pihak Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya pemerintah Kecamatan akan mendistribusikan informasi tersebut kepada Pemerintahan Desa.

Namun penditribusian informasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kecamatan atau kelurahan hanya memilih orang - orang terdekat yang mereka kenal untuk kemudian mereka buatkan proposal dan di ajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Dipihak Kecamatan tidak dilaksanakan sosialisasi secara lebih luas yang dapat mencakup seluruh kalangan di wilayahnya. Dari proses inipun sudah terdapat beberapa permasalahan lain yang dapat timbul yaitu salah satunya dalam pembagian potensi.

Di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, menurut tahapan keluarga sebanyak 123.105 keluarga yaitu keluarga Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 44.711 keluarga atau sejumlah 36,32%, Keluarga Sejahtera I sebanyak 25.972 keluarga atau sejumlah 21,10%, keluarga Sejahtera II sebanyak 13.512 keluarga atau sebanyak 27,97%, Keluarga Sejahtera III

sebanyak 34.434 keluarga dan Keluarga Sejahtera III+ sebanyak 4.476 keluarga atau 3,64%

TABEL 3.3

Banyaknya Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III+
Di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011

No	Kecamatan	KS III		KS III+		Jumlah Total	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Temon	3.050	2,48	860	0,70	7.950	6,46
2	Wates	6.031	4,90	581	0,47	12.893	10,47
3	Panjatan	2.662	2,16	338	0,27	10.538	8,56
4	Galur	3.436	2,79	108	0,09	9.348	7,59
5	Lendah	2.731	2,22	256	0,21	11.486	9,33
6	Sentolo	3.104	2,52	611	0,50	13.375	10,86
7	Pengasih	3.297	2,68	768	0,62	13.688	11,12
8	Kokap	1.146	0,93	176	0,14	10.374	8,43
9	Girimulyo	1.203	0,98	82	0,07	7,395	6,01
10	Nanggulan	3.925	3,19	443	0,36	8.956	7,28
11	Kalibawan g	2.017	1,64	187	0,15	8.647	7,02
12	Samigaluh	1.829	1,49	66	0,05	8.455	6,87

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Dari data tersebut di peroleh bahwa Kecamatan dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi berada di Kecamatan Pengasih sebesar

13.688, sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Sentolo dengan jumlah total 13.375 keluarga, dan diperingkat kedua ditempati oleh ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Wates dengan perolehan total 12.893 keluarga. Sedangkan terakhir ditempati oleh Kecamatan Temon dengan perolehan 7.950 keluarga. Selain itu, tidak sedikit warga miskin yang ada di Kulon Progo. Berikut adalah data banyaknya keluarga miskin yang ada di Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 3.4.

Banyaknya Keluarga Miskin di Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011

No	Kecamatan	Kategori	
		Pra KS	KS I
1	Temon	1.619	1.365
2	Wates	2.883	2.297
3	Panjatan	3.576	2.661
4	Galur	1.601	2.576
5	Lendah	4.173	2.980
6	Sentolo	5.073	3.045
7	Pengasuh	6.166	2.221
8	Kokap	6.011	1.984
9	Girimulyo	3.459	1.588
10	Nanuggulan	2.193	1.563
11	Kalibawang	3.475	2.151
12	Samigaluh	4.482	1.541
Total		44.711	25.972

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Deas, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Sedangkan posisi yang memiliki keluarga miskin paling banyak berada di kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Samigaluh. Berikut adalah analisis pada masing - masing kecamatan.

a) Kecamatan Temon

Kecamatan Temon memiliki 15 desa dan 96 pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Temon mencapai 36,30 km² dengan jarak antara ibukota dengan Kabupaten ke daerah mencapai 9 km. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Temon menduduki peringkat ke 10 dengan kemiskinan menempati nomor 12.

Total penerima dana hibah yang berada di Kecamatan Temon sejumlah 8 kelompok dengan jumlah KAKB warung berjumlah 4 dan KAKB Ekonomi produktif berjumlah 4. pada tahun 2016 jumlah kelompok yang tersisa hanya 3 kelompok. 5 diantaranya sudah tidak aktif lagi.

b) Kecamatan Wates

Kecamatan Wates terdiri dari 8 Desa dan 68 Pedukuhan Luas wilayah Kecamatan Wates mencapai 32,91km². wilayah Wates ini merupakan ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dan sarana - sarana publik terpusat di Kecamatan Wates. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Wates menempati nomor 3 sedangkan kemiskinan berada di nomor 8.

Total penerima dana hibah KAKB di Kecamatan Wates sejumlah 17 kelompok. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin dan keluarga sejahtera yang ada di sana. 1 pedukuhan di wilayah

Kecamatan Wates lolos 3 proposal yaitu berada di pedukuhan Klopoh Sepuluh.

c) Kecamatan Panjatan

Panjatan terdiri dari 11 Desa dan 100 Pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Panjatan mencapai 44,59km² dengan jarak antara ibukota Kabupaten ke daerah Kecamatan Panjatan hanya 4 km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Panjatan menempati nomor 5 sedangkan kemiskinan berada di urutan 5 pula.

Jumlah penerima hibah KAKB di Kecamatan Panjatan berjumlah 11 dengan jumlah KAKB warung berjumlah 5 dan KAKB ekonomi produktif berjumlah 6 kelompok.

d) Kecamatan Galur

Galur terdiri dari 7 Desa dan 75 pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Galur mencapai 32,91km² dengan jarak antara ibukota Kabupaten dengan Kecamatan ini mencapai 12 km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Galur berada di urutan nomor 6 sedangkan kemiskinan berada di urutan 10. Penerima hibah KAKB di Kecamatan Galur berjumlah 7 kelompok dengan KAKB warung.

e) Kecamatan Lendah

Lendah terdiri dari 6 desa dan 62 pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Lendah mencapai 35,59km² dengan jarak antara ibukota

Kabupaten dengan Kecamatan ini mencapai 14 km. Tingkat Kesejahteraan Kecamatan Lendah berada di urutan 4 dengan kemiskinan berada di nomor 4. jumlah penerima hibah KAKB dengan jumlah 8 kelompok, jumlah KAKB warung sebesar 5 kelompok dan KAKB ekonomi produktif sebesar 3 kelompok.

f) Kecamatan Sentolo

Sentolo terdiri dari 8 Desa dan 84 Pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Sentolo mencapai 52,65km² dengan jarak antara wilayah Kecamatan ini dengan Ibukota Kabupaten mencapai 18km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Sentolo berada di urutan nomor 2 namun kemiskinan juga berada di nomor 2. jumlah penerima hibah KAKB di wilayah Kecamatan Sentolo mencapai 8 kelompok dengan jumlah kelompok KAKB warung berjumlah 6 orang dan KAKB ekonomi produktif berjumlah 2 orang.

g) Kecamatan Pengasih

Pengasih terdiri dari 7 Desa dan 78 Pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Pengasih mencapai 61,66 km² dengan jarak antara wilayah Kecamatan ini dengan Ibukota Kabupaten mencapai 8 km. Tingkat kesejahteraan di Kecamatan Pengasih berada di urutan nomor 1 dengan tingkat kemiskinan berada di nomor 1. jumlah penerima hibah KAKB di kecamatan Pengasih mencapai 8 orang dengan KAKB warung berjumlah 3 kelompok dan KAKB ekonomi produktif berjumlah 5 kelompok.

h) Kecamatan Kokap

Kokap terdiri dari 5 Desa dan 50 Pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Kokap mencapai 73,80 km² dengan jarak antara wilayah kecamatan ini dengan Ibukota Kabupaten mencapai 10 km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan kokap berada di urutan nomor 5 dengan tingkat kemiskinan berada di nomor 3. jumlah pnerima hibah KAKB di Kecamatan Kokap mencapai 8 kelompok dengan KAKB warung berjumlah 3 kelompok dan KAKB ekonomi produktif mencapai 5 kelompok.

i) Kecamatan Girimulyo

Girimulyo terdiri dari 4 Desa dan 57 Pedukuhan Luas wilayah Kecamatan Girimulyo ini mencapai 54,90 km² dengan jarak antara wilayah Kecamatan ini dengan Ibukota Kabupaten mencapai 38 km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Girimulyo berada di urutan nomor 11 dengan tingkat kemiskinan berada di urutan nomor 9. jumlah penerima hibah KAKB di Kecamatan Girimulyo mencapai 6 kelompok dengan KAKB warung berjumlah 2 kelompok dan KAKB ekonomi produktif berjumlah 4 kelompok.

j) Kecamatan Nanggulan

Nanggulan terdiri dari 6 Desa dan 61 Pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Nanggulan mencapai 39,61km² dengan jarak antara wilayah

Kecamatan ini dengan ibukota Kabupaten mencapai 26 km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Nanggulan berada di urutan nomor 7 dengan tingkat kemiskinan berada di nomor 10. jumlah penerima hibah KAKB di Kecamatan Nanggulan berjumlah 9 kelompok dengan 2 kelompok KAKB warung dan 6 kelompok KAKB ekonomi produktif.

k) Kecamatan Kalibawang

Kecamatan Kalibawang memiliki luas wilayah 5.296,37 ha dan 33.387 jiwa. Kecamatan Kalibawang sendiri memiliki 4 desa dan 84 Pedukuhan. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Kalibawang berada di nomor 8 dengan kemiskinan berada di nomor 7. hibah KAKB di kecamatan Kalibawang berjumlah 6 kelompok dengan KAKB warung berjumlah 2 kelompok dan KAKB ekonomi Produktif berjumlah 5 kelompok.

l) Kecamatan Samigaluh

Samigaluh terdiri dari 7 Desa dan 106 Pedukuhan. Luas wilayah Kecamatan Samigaluh mencapai 69,29km² dengan jarak antara wilayah Kecamatan ini dengan Ibukota Kabupaten mencapai 44 km. Tingkat kesejahteraan Kecamatan Samigaluh berada di urutan nomor 9 dengan kemiskinan berada di nomor 6. sedangkan Kecamatan Samigaluh hanya memiliki 3 kelompok KAKB dengan jenis KAKB warung semua.

Dari pengolahan data diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat paling tinggi berada di Kecamatan Pengasih dengan jumlah 13.688 keluarga, peringkat kedua ditempati oleh Kecamatan Sentolo dengan

jumlah 13.375 keluarga dan peringkat ketiga ditempati oleh Kecamatan Wates dengan perolehan 12.893 keluarga. Sedangkan untuk posisi paling sedikit keluarga sejahtera di Kulon Progo ditempati oleh Kecamatan Girimulyo dengan total hanya 7.395 keluarga sejahtera yang ada di sana , peringkat kedua dari bawah ada Kecamatan Temon dengan 7.950 Keluarga dan Kecamatan Samigaluh dengan 8.455 keluarga.

Sedangkan untuk kecamatan dengan kesejahteraan atau jumlah keluarga miskin paling banyak ditempati oleh Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Girimulyo.

Namun dalam hal ini jumlah kelompok di sumber - sumber kemiskinan justru hanya sedikit. Wiayah paling banyak berada di Kecamatan Wates dengan jumlah 17 Kelompok padahal sudah jelas di Kecamatan tersebut jumlah keluarga yang mampu atau sejahtera sangat banyak dan keluarga miskin yang sedikit. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Samigaluh yang menduduki peringkat akhir di jumlah keluarga sejahtera dan paling banyak di keluarga miskin hanya memperoleh tiga kelompok saja. Kelompok - kelompok tersebut yang ada di Samigaluh hanya berbentuk warung dan bukan merupakan pengolah hasil bumi. Padahal hasil bumi yang ada di Samigaluh melimpah .

Ketidakberdayaan instansi pemerintah untuk menyaring dan menyeleksi prioritas - prioritas yang ada di wilayah kemiskinan menjadikan program ini sia - sia. Hal tersebut seimbang dengan tingkat pendidikan dari pegawai

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menurut tingkat pendudukannya pada tahun program ini dalam proses seleksi yaitu dari 103 pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lulusan S2/S3 hanyalah 4 orang, DIV./S1 berjumlah 58 orang, D1/D2 berjumlah 8 orang, SMA berjumlah 30 orang dan SMP berjumlah 2 orang serta SD berjumlah 1 orang

Dari data tersebut, 17 kelompok berada di wilayah yang mempunyai tingkat kesejahteraan tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah yaitu di Kecamatan Wates. Di Kecamatan ini 1 pedukuhan memperoleh 3 dana hibah senilai Rp. 30.000.0000,- dan dana tersebut tidak diketahui pertanggungjawabannya. Sedangkan di wilayah Samigaluh hanya memperoleh 3 kelompok dengan seluruh dusun mengumpulkan proposal ke Dinas. 3 kelompok yang ada di wilayah Kecamatan Samigaluhpun hanya berbentuk warung bukan ekonomi produktif dan saat ini sudah tidak berjalan

Selain itu, tujuan program ini adalah sebagai pemberdayaan masyarakat miskin dengan masyarakat miskin sebagai obyek dalam pemberdayaan, namun dalam kenyataan tidak seperti apa yang direncanakan. Warga miskin hanya menikmati saja apa yang sudah dihasilkan dari modal awal 10juta rupiah.

Ketidakjelasan program serta lemahnya tingkat pendidikan yang ada di Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat program ini dianggap oleh beberapa

instansi lain sebagai program yang tidak tepat sasaran dan hanya sebatas inisiatif menjalankan program saja.

Hal ini disampaikan pula oleh fraksi PAN Priyo Santoso yang menyatakan bahwa program KAKB ini merupakan program yang bagus. Namun untuk pelaksanaannya belum terstruktur secara baik dalam tubuh dinas sendiri maupun dari kelompok - kelompok sasaran. Pergantian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dahulu adalah Badan merupakan salah satu kendala yang terjadi pada tahun 2015 karena pengurus yang mengurus KAKB juga terpaksa harus diganti.